

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Jumlah pemerintah negara berkembang yang menunjukkan ketertarikan untuk penggunaan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan aset dan layanan infrastruktur publik semakin meningkat (world bank, 2014). KPS merupakan pilihan yang semakin populer bagi para pembuat kebijakan dalam pengimplementasian proyek-proyek publik yang dianggap penting terutama dalam mengatasi kekurangan sumber pendanaan pemerintah dan pentingnya mengatasi ketidakefektifan publik (Alfen dalam Ismail, 2013). Keberhasilan pelaksanaan KPS di dunia seperti di Inggris, Hongkong, Singapura, Australia, Malaysia, dan Latvia juga menyebabkan umumnya konsep KPS di Indonesia.

Di Indonesia, konsep KPS dipilih sebagai alternatif oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sejak pembangunan infrastruktur mulai melambat karena krisis moneter (Joesoef, 2011). Keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur menyebabkan muncul pertimbangan pentingnya memperkuat KPS yang dilihat dari tiga dimensi yang terdiri dari alasan politis (menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance* dan *good society*), alasan administratif (adanya keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen), dan alasan ekonomis (mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi risiko) (Tri Widodo dalam Setianto, dkk, 2009).

Melalui pendekatan KPS, pihak swasta diharapkan dapat memberikan pelayanan umum yang lebih baik dikarenakan pihak swasta lebih cepat tanggap dalam penggunaan teknologi baru yang efisien dan menerapkan manajemen pengelolaan yang modern sehingga dinilai mampu menyediakan jasa infrastruktur yang lebih murah dan terjangkau (Adji, 2010).

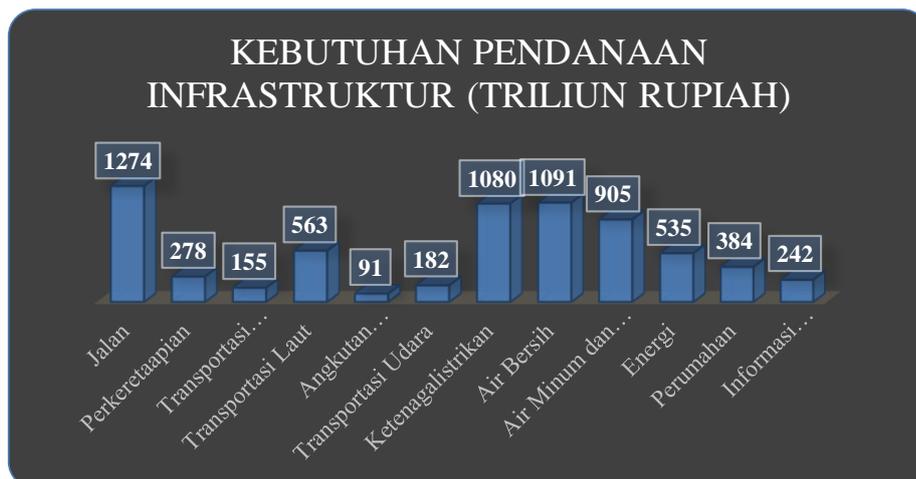
Di sisi lain, berbagai masalah juga ditemui pada KPS dalam mengembangkan infrastruktur di dunia. Masalah-masalah yang ditemui yaitu lambatnya *progress* dalam pengimplementasian (Zhang, 2005), munculnya masalah yang menyangkut tingginya biaya tender, negosiasi yang sulit dan konflik pendapat yang timbul diantara pemangku kepentingan (Akintoye,dkk, 2001), adanya perbedaan keinginan antara pemerintah dan investor swasta, kurangnya informasi mengenai skema KPS (Adji, 2010), serta kurangnya informasi yang diberikan kepada investor terkait proyek yang akan dibangun atau juga disebabkan oleh studi kelayakan yang kurang detail sehingga mengakibatkan potensi kerugian bagi investor (Prianti, 2010).

Masalah-masalah yang ditimbulkan pada KPS yaitu seperti oposisi publik yang kuat terhadap beberapa proyek yang diprivatisasi di Lao PDR (Pahlman dalam Zhang, 2005) dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Levy dalam Zhang, 2005), kegagalan dua proyek *build-operate-transfer* (BOT) di Thailand karena ketidakstabilan politik dan alasan lainnya (Ogunlana dalam Zhang, 2005), kegagalan proyek limbah nasional di Malaysia (Azis dalam Zhang, 2005), masalah terkait permintaan yang rendah dari perkiraan di Kolombia (Irwin dalam World Bank, 2014), dan perencanaan yang kurang matang pada Proyek Air di Mumbai (World Bank, 2014). Berbagai masalah yang terjadi pada KPS merupakan hal yang wajar mengingat berbagai risiko dan ketidakpastian dalam kontrak KPS, banyaknya pihak yang terlibat, serta kurangnya pengalaman dan keahlian dalam KPS di berbagai negara dan daerah (Zhang, 2005).

Pelaksanaan KPS erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dikarenakan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses

pembangunan nasional dan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bappenas, 2003). Infrastruktur juga merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing suatu negara. Berdasarkan hasil survei *World Economic Forum* yang berjudul *Global Competitiveness Report 2017-2018* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 36 jika dilihat dari semua indeks. Namun, jika dilihat dari pilar infrastruktur diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat ke 52 dari 137 negara. Pentingnya peran infrastruktur sehingga dalam studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan tingkat pengembalian infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 60% (Dikun, 2003).

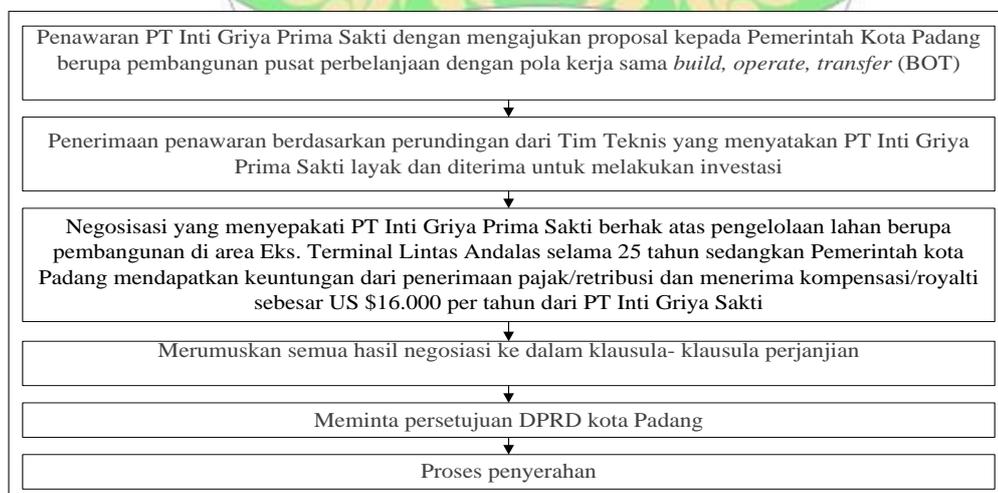
Penyediaan infrastruktur yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan pendanaan yang besar untuk menyediakan infrastruktur. Berdasarkan data RPJMN 2015-2019, indikasi kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk lima tahun ke depan (2015-2019) dalam rangka mendukung perekonomian nasional yaitu sebesar Rp. 6.780 Triliun. Kemampuan APBN dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur hanyalah sebesar 52% dan hanya sekitar 28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan obligasi dan pembiayaan lainnya. Sehingga dibutuhkan 20% dari total kebutuhan infrastruktur yang diharapkan akan dipenuhi dari kerja sama pemerintah-swasta (SMI, 2014). Keterbatasan pendanaan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dapat diatasi dengan pendekatan pola kerja sama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) sehingga tanggung jawab pembangunan infrastruktur tidak lagi seluruhnya dipikul oleh pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab pihak swasta (Ristek, 2010). **Gambar 1.1** merupakan grafik tingkat kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 1.1 Tingkat Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia Tahun 2015-2019 (Sumber: RPJMN 2015-2019)

Pentingnya peran KPS dalam penyediaan infrastruktur mengakibatkan perlunya diidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau *success factors* (SFs) pada KPS dalam pembangunan infrastruktur mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan KPS.

Salah satu contoh proyek KPS dalam penyediaan infrastruktur di kota Padang yang pelaksanaannya sudah mencapai tahap pengoperasian yaitu pembangunan Plaza Andalas. Proses perjanjian kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan Plaza Andalas dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2 Perjanjian Kerja Sama dalam Pembangunan Plaza Andalas (Sumber : Huda, 2010)

Kerja sama ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan penelitian untuk menentukan faktor-faktor kritis keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta pada pembangunan dan pengoperasian Plaza Andalas untuk dijadikan masukan/ bahan pertimbangan bagi praktisi di kalangan pemerintah, sektor swasta, kalangan akademisi dan konsultan untuk dapat melaksanakan kerja sama pemerintah dan swasta yang lebih baik pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya dan memberikan gambaran dari penelitian mengenai faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian khusus dari praktisi untuk mencapai keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta.

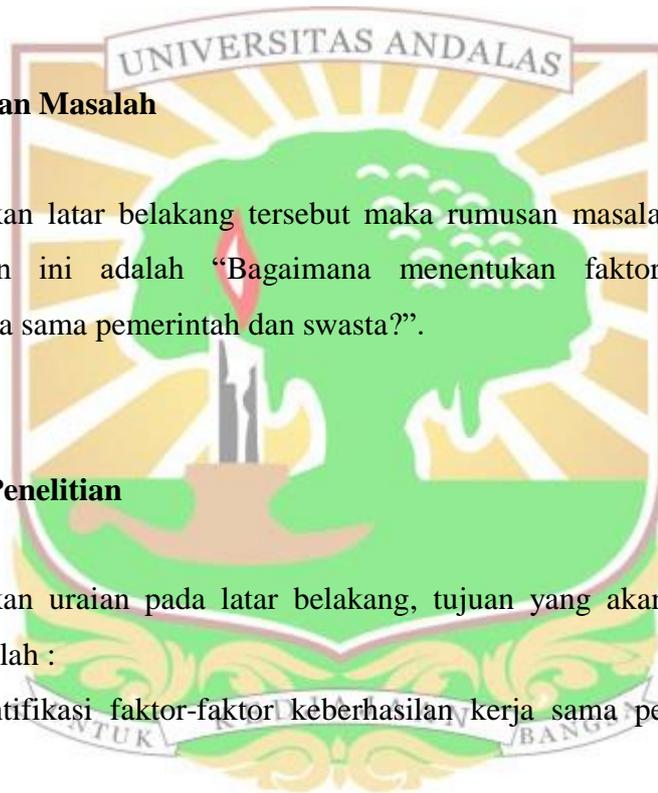
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menentukan faktor-faktor kritis keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta.
2. Menentukan faktor- faktor kritis keberhasilan atau *critical success factors* (CSFs) kerja sama pemerintah dan swasta.



1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengidentifikasian faktor-faktor keberhasilan dilakukan pada kerja sama pemerintah dan swasta dengan model kerja sama *build-operate-transfer* (BOT).
2. Penelitian tidak melibatkan PT Inti Griya Prima Sakti selaku pihak swasta dalam kerja sama pemerintah dan swasta pada pembangunan Plaza Andalas sebagai responden dalam penelitian.
3. Perhitungan tingkat kepentingan masing-masing faktor keberhasilan dilakukan dengan menggunakan metode *significance index*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada pembuatan tugas akhir ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan laporan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang dijadikan sebagai kerangka kerja yang sistematis dalam melakukan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan pengumpulan dan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan serta penyajian dari data yang telah diolah.

BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan analisis dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

